

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 18-20 April 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo, Halaman Laporan Utama 1	Senin, 20 April 2020	Bappenas Lanjutkan Rencana Induk Ibu Kota Negara	Kementerian Bappenas berusaha mengejar penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota negara. Deputi pengembangan regional bappenas Rudy Soepriyadi Prawiradinata mengatakan, meski pemerintah tengah menghadapi pandemi Covid-19, lembangnya harus meneruskan sebagian pekerjaan yang sudah direncanakan agar megaprojek itu tak tertunda terlalu jauh.
2	Koran Tempo, Halaman Laporan Utama 2	Senin, 20 April 2020	Dewan Minta Pemerintah Berfokus Tangani Pandemi	Anggota DPR dari Partai NasDem, Taufik Basari, berharap pemerintah mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk penanggulangan wabah Covid-19. Dia berpendapat, proyek-proyek yang tak berkaitan langsung dengan situasi kedaruratan, seperti proyek ibu kota negara baru, harus ditunda.
3	Koran Tempo, Halaman Laporan Utama 3	Senin, 20 April 2020	Ahli: Berfokus pada Wabah, Tunda Infrastruktur	Desakan agar pemerintah menunda proyek pemindahan ibu kota negara mengalir dari sejumlah ahli. Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, meminta pemerintah memakai pendekatan kedaruratan kesehatan publik dalam menyusun APBN.
4	Bisnis Indonesia, Halaman 6	Senin, 20 April 2020	Berita Foto	BUJT masih berupaya mengejar target konstruksi dan operasional sejumlah ruas tol pada tahun ini kendati terhambat penyebaran COVID-19.

Judul	Bappenas Lanjutkan Rencana Induk Ibu Kota Negara	Tanggal	Senin, 20 April 2020
Media	Koran Tempo, Halaman Laporan Utama 1		
Resume	Kementerian Bappenas berusaha mengejar penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota negara. Deputi pengembangan regional bappenas Rudy Soepriyadi Prawiradinata mengatakan, meski pemerintah tengah menghadapi pandemi Covid-19, lembaganya harus meneruskan sebagian pekerjaan yang sudah direncanakan agar megaprojek itu tak tertunda terlalu jauh.		

LAPORAN UTAMA

Bappenas Lanjutkan Rencana Induk Ibu Kota Negara

Pemerintah terus menjaga komunikasi dengan calon investor.

EDISI, 20 APRIL 2020



Rapat terbatas terkait persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Desember lalu. Foto: Setkab.go.id

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berusaha mengejar penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota negara. Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soepriyadi Prawiradinata mengatakan, meski pemerintah tengah menghadapi pandemi Covid-19, lembaganya harus meneruskan sebagian pekerjaan yang sudah direncanakan agar megaprojek itu tak tertunda terlalu jauh.

"Jangan dikira kami tidak peduli," kata Rudy kepada Tempo, kemarin. Upaya penyusunan analisis dan rencana induk itu, menurut Rudy, dapat dikerjakan secara paralel tanpa menghambat upaya penanganan wabah.

Rudy menambahkan, kelanjutan proyek pemindahan pusat pemerintahan itu sar sekali tak mengusik alokasi dana untuk pengendalian Covid-19. Bappenas telah merealokasi Rp 640 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 untuk kebutuhan yang terkait dengan pandemi. Menurut Rudy, biaya survei lapangan dan sejumlah keperluan dinas proyek ibu kota baru turut dipangkas.

Ia memastikan pengerjaan yang tidak krusial bisa ditunda. Pengerjaan fisik di proyek ibu kota juga belum dijalankan pada tahun ini. "Kami hanya berfokus pada kegiatan yang bersifat lunak dulu," ujar Rudy.

Salah satunya adalah menawarkan paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara senilai Rp 85 miliar. Rudy mengakui proyek penyusunan rencana induk itu ditawarkan sejak akhir Maret lalu, dengan memakai dana APBN 2020. "Tapi penawaran itu sudah terencana sejak akhir 2019, dan sudah bidding internasional," ucap dia. "Jika prosesnya tak berkesinambungan, akan lebih merepotkan untuk dikerjakan."

Merujuk pada situs layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), calon konsultan tersebut akan dipilih melalui penunjukan langsung. Semua calon peserta akan dievaluasi pada 27-29 April mendatang. Adapun penandatanganan kontrak rencananya berlangsung pada awal bulan depan. Rudy menargetkan penyusunan rencana induk bisa rampung sebelum akhir tahun.

Baca Juga

by Dable

- Membasmi Covid-19 dengan Sabun - Sektor Jasa Jadi Motor Pertumbuhan Ilmu dan Teknologi
- Bappenas Siapkan Pembentukan Badan Otoritas Ibu Kota Baru - Ekonomi dan... Olahraga Ringan Dapat Cegah Covid-19 - Ilmu dan Teknologi
- Puisi Melawan Pandemi - Seni
- Amerika Bisa Jadi Episenter Baru Covid-19 - Internasional

Sejak akhir tahun lalu, pemerintah menyusun regulasi ibu kota baru yang akan berada di sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah sempat menargetkan rancangan undang-undang ibu kota negara keluar pada pertengahan tahun ini. Dengan begitu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa memulai pembangunan infrastruktur dasar pada semester kedua tahun ini. Namun, setelah wabah merebak, target yang telah ditetapkan meleset dari jadwal.

Meski sejumlah target tertunda akibat Covid-19, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan perencanaan ibu kota baru tak perlu dihentikan. "Asalkan dikerjakan dalam batas yang bisa ditoleransi," kata dia. "Kalau waktunya sudah memungkinkan, baru tancap gas lagi."

Ia memastikan pengerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi tetap diteruskan. Dengan begitu, persiapan menuju groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini, atau selambat-lambatnya tahun depan.

Kepala Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya masih melanjutkan penyusunan desain kawasan inti ibu kota seluas 5.644 hektare. Menurut dia, Kementerian PUPR belum mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru. "Pekerjaan untuk ibu kota negara belum dianggarkan dan sedang tak menjadi prioritas," kata dia, kemarin.

Saat ini, Endra menambahkan, Kementerian sedang merealokasi anggaran hingga Rp 24,5 triliun dari pagu APBN 2020 untuk penanggulangan Covid-19. "Realokasi itu akan bertambah menjadi Rp 44 triliun, tapi masih harus kami laporkan ke DPR," tutur Endra.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menambahkan, unitnya juga masih mematangkan rencana jaringan jalan di kawasan ibu kota baru. "Eksekusinya harus menunggu selesainya undang-undang," katanya. Meski begitu, juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah terus menjaga komunikasi dengan para calon investor.

MAJALAH TEMPO | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS

JEJAK MENUJU KOTA BARU

WACANA pemindahan ibu kota negara sudah tercebut pada puluhan tahun silam. Presiden Sukarno, pada 1957, sempat memimpikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai pengganti DKI Jakarta. Gagasan itu kembali berdentung di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012. Tahun lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan Kalimantan Timur sebagai calon lokasi ibu kota negara.

APRIL 2019

Rapat terbatas Kabinet Kerja memutuskan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Bappenas sudah diminta menyiapkan kajian awal sejak 2017.

AGUSTUS 2019

Presiden Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai calon lokasi ibu kota negara yang baru. Tepatnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

SEPTEMBER 2019

Pemerintah mulai menyiapkan rancangan regulasi pemindahan ibu kota negara, pengadaan lahan, serta badan otorita untuk memimin jalannya proyek.

OKTOBER 2019

McKinsey Indonesia ditetapkan sebagai konsultan studi kelayakan pemindahan ibu kota yang dilelang Bappenas, dengan dana Rp 24,9 miliar. Lembaga itu menyusun pra-masterplan. Studi kelayakan itu diperkirakan memakan waktu tiga bulan.

DESEMBER 2019

Tim Urban+ yang dipimpin arsitek Sofian Sibarani memenangkan sayembara desain ibu kota yang digelar Kementerian PUPR.

JANUARI 2020

Presiden Jokowi menemui Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan; Presiden Softbank Masayoshi Son; serta eks Perdana Menteri Inggris, Tony Blair guna membahas ibu kota negara.

MARET 2020

Bappenas menawarkan jasa konsultasi penyusunan rencana induk pemindahan ibu kota negara dengan dana Rp 85 miliar. Proses evaluasi dijadwalkan berlangsung pada 27 April, sementara penandatanganan kontrak dilakukan pada awal Mei 2020.

SUMBER: RISET, WAWANCARA, KAJIAN AWAL BAPPENAS 2019
TEKS: YOHANES PASKALIS

Judul	Dewan Minta Pemerintah Berfokus Tangani Pandemi	Tanggal	Senin, 20 April 2020
Media	Koran Tempo, Halaman Laporan Utama 2		
Resume	Anggota DPR dari Partai NasDem, Taufik Basari, berharap pemerintah mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk penanggulangan wabah Covid-19. Dia berpendapat, proyek-proyek yang tak berkaitan langsung dengan situasi kedaruratan, seperti proyek ibu kota negara baru, harus ditunda.		

LAPORAN UTAMA

Dewan Minta Pemerintah Berfokus Tangani Pandemi

Pemerintah mengatakan persiapan pembangunan ibu kota negara berjalan terus.

EDISI, 20 APRIL 2020



Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana Ibu Kota Baru di Singkohu, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur, Desember 2019. Foto: ANI/AAAMar Nugroho Gurnay

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem, Taufik Basari, berharap pemerintah mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk penanggulangan wabah Covid-19. Dia berpendapat, proyek-proyek yang tak berkaitan langsung dengan situasi kedaruratan, seperti proyek ibu kota negara baru, harus ditunda.

"Pemerintah harus berani mengambil kebijakan strategis dalam hal merealokasi anggaran, termasuk mempertimbangkan kembali pembangunan yang direncanakan," ujar Taufik kepada Tempo, kemarin.

Saat ini, Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 401 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu terbagi atas Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk kebutuhan jaring pengaman sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program ekonomi nasional.

Taufik menghitung dana tersebut tidak akan cukup, khususnya untuk kebutuhan penanganan kesehatan masyarakat. Dia meminta pemerintah menambah alokasi lantaran masa pandemi tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Kebijakan belanja, kata dia, juga harus memperhitungkan situasi terburuk. "Kita harus siap mengantisipasi kondisi terburuk," ujar dia.

Pemerintah sejak tahun lalu terus menggeber pembangunan ibu kota baru di kawasan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Targetnya, regulasi proyek beserta kelebagaannya terbit pada pertengahan tahun ini. Jika persoalan legal rampung, pemerintah pusat akan mulai membangun infrastruktur penunjang, seperti sumber air bersih untuk penghuni kota.

Kelanjutan proyek ibu kota negara termuat dalam rencana pengadaan jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional senilai Rp 85 miliar. Pengadaan jasa tersebut memakai skema penunjukan langsung dan mengambil dana dari anggaran 2020.

Anggota Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mempertanyakan perencanaan proyek tersebut. Pasalnya, kata Mardani, sejauh ini tak ada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Dewan. Rapat paripurna juga belum mengamanatkan alat kelengkapan Dewan untuk membahas ketentuan yang rencananya tertuang dalam omnibus law tersebut. "Semuanya tak bisa dilaksanakan tanpa payung hukum yang kuat," kata dia.

Sejak awal, dia menegaskan, partainya tetap menolak megaprojek ini lantaran tak tercantum dalam rencana pembangunan pemerintah dan minim kajian. Apalagi, pemerintah juga tengah berfokus menekan defisit anggaran, sehingga duit yang ada semestinya digunakan untuk menangani pandemi.

Keresahan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebutkan saat ini masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang kekurangan alat pelindung diri, masker, dan peralatan kesehatan.

Karena itu, Saleh meminta pemerintah memfokuskan anggaran untuk menghadapi penyebaran wabah yang diperkirakan meluas. "UI memprediksi bisa sampai 600 ribu orang terjangkau. Itu membutuhkan anggaran yang besar sekali," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, turut mendesak pemerintah mengesampingkan rencana pemindahan ibu kota negara supaya berfokus pada penanganan wabah. Dia menyarankan pemerintah melakukan renegotiasi pembayaran jika ada kontrak yang telanjur diteken.

Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, membenarkan kabar bahwa proyek ibu kota baru masih terus dibahas. Proses persiapannya juga tetap berjalan. Namun dia menyangkal pemerintah sudah mengalokasikan anggaran. Jodi memastikan Presiden tetap memfokuskan kas negara untuk penanganan pandemi. "Tapi kalau hal-hal lain, perencanaan, penyusunan regulasi, ya, tetap harus jalan," ucap Jodi. **AVIT HIDAYAT | YOHANES PASKALIS | ROBBY IRFANY**

Judul	Ahli: Berfokus pada Wabah, Tunda Infrastruktur	Tanggal	Senin, 20 April 2020
Media	Koran Tempo, Halaman Laporan Utama 3		
Resume	Desakan agar pemerintah menunda proyek pemindahan ibu kota negara mengalir dari sejumlah ahli. Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, meminta pemerintah memakai pendekatan kedaruratan kesehatan publik dalam menyusun APBN.		

LAPORAN UTAMA

Ahli: Berfokus pada Wabah, Tunda Infrastruktur

Pemerintah didesak untuk memperbesar bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak corona.

EDISI, 20 APRIL 2020



Prajurit TNI menurunkan sejumlah kotak kardus berisi Alat Pelindung Diri (APD) di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Bilang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Sabtu pekan lalu. ANTARA/Ampelsa

JAKARTA - Desakan agar pemerintah menunda proyek pemindahan ibu kota negara mengalir dari sejumlah ahli. Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, meminta pemerintah memakai pendekatan kedaruratan kesehatan publik dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan pendekatan ini, menurut dia, pemerintah bisa mengesampingkan belanja yang tak berkaitan langsung dengan perbaikan kesehatan publik dan penanggulangan dampak wabah Covid-19. "Jangan sampai kita ke depankan aspek investasi, seolah-olah kita tidak berempati," kata Hermawan kepada Tempo, kemarin. Ia menilai kemauan pemerintah menangani Covid-19 masih setengah hati.

Hermawan menuturkan, ketimbang memikirkan proyek infrastruktur, pemerintah perlu memangkas birokrasi dalam penyaluran dana wabah. Untuk pos kesehatan, misalnya, pengguna langsung dana masih menempuh birokrasi dari dinas kesehatan kabupaten atau kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Padahal, kata dia, masih banyak fasilitas kesehatan yang mengeluarkan kekurangan alat pelindung diri, ruangan isolasi, dan peralatan kesehatan lain.

Ia juga menilai anggaran yang disediakan pemerintah saat ini belum cukup untuk menghadapi pandemi, yang diperkirakan baru mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Pemerintah, kata dia, juga harus berhadapan dengan dampak yang berisiko timbul akibat kasus yang tidak dilaporkan lantaran pemeriksaan belum masif.

Pakar kebijakan publik yang juga honorary fellow dari University of Manchester, Yanuar Nugroho, meminta pemerintah menunda proyek infrastruktur jangka menengah dan jangka panjang. Menurut dia, saat ini program utama yang harus diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur kesehatan dan distribusi peralatan medis, termasuk obat-obatan. "Pembahasan proyek ibu kota bukan hanya tidak peka terhadap krisis, tapi juga dalam kebijakan publik kehilangan relevansi," ujar Yanuar.

Dengan anggaran yang ada saat ini, kata Yanuar, pemerintah masih bisa menambah besaran bantuan, seperti Program Keluarga Harapan ataupun bantuan pangan nontunai. "Skema delivery masih bisa ditingkatkan efektivitasnya," kata dia.

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, juga berharap pemerintah mengesampingkan berbagai program, seperti omnibus law atau ibu kota negara baru. Menurut dia, pengendalian wabah Covid-19 harus diutamakan. "Kalau hal itu tidak dikendalikan, dan menyebabkan orang sakit, ekonomi juga akan tetap terkena dampak," ucapnya.

Chatib meminta pemerintah berfokus mengalokasikan anggaran untuk tiga hal. Prioritas pertama adalah pembiayaan sektor kesehatan untuk memastikan Indonesia keluar dari masa pandemi. Alokasi itu, ia melanjutkan, mencakup penyediaan pelbagai fasilitas guna mendukung penanganan kesehatan, misalnya alat tes, ventilator, dan alat kesehatan lain.

Fokus kedua pemerintah, menurut Chatib, adalah menyiapkan jaring pengaman sosial. "Pemerintah harus memberikan kompensasi agar orang diam di rumah. Karena kalau tidak, mereka akan tetap keluar untuk bekerja, khususnya di sektor informal," tuturnya.

Pemerintah juga harus membantu perusahaan yang terkena imbas corona. Chatib memperkirakan, dalam 3-6 bulan ke depan, kinerja keuangan perusahaan mulai mengalami kesulitan dan berimbas pada kemampuan membayar utang. Dalam kondisi itu, pemerintah harus membantu memberikan stimulus agar mereka bisa bertahan.

Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan sejauh ini belum ada keputusan perihal proyek ibu kota negara dari Presiden. Pemerintah, tutur dia, juga belum mengusulkan anggaran proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. "Proyek IKN (ibu kota negara) belum diputuskan oleh Presiden, anggarannya belum dianggarkan di 2020," kata dia. **CAESAR AKBAR | AVIT HIDAYAT | ROBBY IRFANY**

SETUMPUK MASALAH DI TEMPAT BARU

PRESIDEN Joko Widodo menargetkan pembangunan kawasan inti ibu kota negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bakal dimulai pada 2022-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berusaha menyelesaikan penyusunan rencana induk ibu kota negara akhir tahun ini. Berikut ini sejumlah masalah yang akan muncul pada pembangunan ibu kota negara.

- ▼ Pembangunan dimulai dari lahan kosong hingga menjadi gedung-gedung pemerintahan. Perkiraan dana pembangunan mencapai Rp 466 triliun dan menempati 256 ribu hektare lahan.
- ▼ Perencanaan induk seharusnya tidak hanya mencakup pembangunan ibu kota baru, tapi juga proyeksi atas DKI Jakarta yang akan ditinggalkan.
- ▼ Masalah kepadatan penduduk dan kemacetan di Jawa atau di DKI Jakarta tidak akan serta-merta hilang jika ibu kota negara dipindahkan.
- ▼ Pemindahan ibu kota akan menjadi beban warisan bagi pemerintahan berikutnya. Jika prosesnya tidak sesuai dengan harapan, justru akan ada masalah yang sama di tempat baru.
- ▼ Kajian Jaringan Advokasi Tambang menyebutkan proyek ibu kota baru bakal menguntungkan 625 pemegang izin usaha pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- ▼ Pemindahan ibu kota akan merampas ruang hidup warga pesisir atau 10 ribu nelayan yang hidup di Teluk Balikpapan.
- ▼ Ibu kota negara diprediksi meningkatkan kesenjangan masyarakat. Sebab, yang dipindahkan sebagian besar merupakan kelompok kelas menengah ke atas dari DKI Jakarta.
- ▼ Kajian lingkungan hidup strategis menemukan lokasi ibu kota negara baru memiliki keterbatasan suplai air baku.
- ▼ Wilayah ibu kota negara dan sekitarnya merupakan habitat ruang jelajah beberapa spesies kunci, seperti orang utan, bekantan, beruang madu, dugong, dan pesut.

SUMBER: LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, WAWANCARA
TEKS: AVIT HIDAYAT

Judul	Berita Foto	Tanggal	Senin, 20 April 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 6		
Resume	BUJT masih berupaya mengejar target konstruksi dan operasional sejumlah ruas tol pada tahun ini kendati terhambat penyebaran COVID-19.		

■ KEJAR TARGET PROYEK TOL



Bisnis/Himawan L. Nugraha

Foto aerial proyek pembangunan jalan tol Serpong-Cinere di Tangerang Selatan, Banten, Minggu (19/4). Badan usaha jalan tol (BUJT) masih berupaya mengejar

target konstruksi dan operasional sejumlah ruas tol pada tahun ini kendati terhambat penyebaran COVID-19.